

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Harahap (2001) anggaran adalah konsep yang membantu manajemen dan memudahkan manajemen dalam mencapai tujuan. Tanpa anggaran setiap individu pada perusahaan baik perusahaan swasta maupun pemerintah akan cenderung bekerja dengan inisiatif sendiri, tanpa koordinasi maka akan terjadi penghamburan sumber daya dan berbagai efek buruk lainnya. Akibatnya strategi besar operasional tidak berjalan sesuai dengan keinginan, dengan kondisi seperti ini tujuan dan sasaran instansi tidak dapat tercapai dengan baik. Analisis penyusunan laporan realisasi Anggaran dalam suatu instansi oleh manajemen tidak boleh disiapkan sebagai suatu angan-angan, tetapi harus realita agar sesuatu yang buruk nantinya yang akan terjadi dapat dikurangi atau bahkan dihindari.

Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang memiliki tugas membantu Walikota dalam menentukan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan di daerah serta penilaian dan pelaksanaannya. Bappeda dibentuk berdasarkan kebutuhan, perkembangan serta kemajuan di Bidang Pemerintahan serta kemajuan teknologi yang terus semakin berkembang, guna membantu pemerintah daerah melaksanakan pembangunan khususnya dibidang pemerintahan.

Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Badan Perencanaan Pemangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu entitas akuntansi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dengan direvisinya UU No. 22 tahun 1999 ke UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 ke UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah merupakan perundang-undangan yang berhubungan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Otonomi daerah pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran yang sesuai dengan kepentingan daerahnya masing – masing. Masing – masing daerah diberikan kewajiban dan kewenangan untuk menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Anggaran merupakan alat penting dalam perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam sebuah organisasi. Anggaran operasi biasanya meliputi waktu satu tahun dengan menyorakan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun itu. Dengan adanya anggaran manajemen yang diharapkan dapat menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi suatu operasi dengan membandingkannya antara anggaran dengan realisasi yang dicapai.

Untuk menilai tingkat efektivitas dan efisiensi dari penggunaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah tidak dapat langsung dinyatakan dalam bentuk baik ataupun tidak, karena penilaian kinerja pada pemerintahan tidak sama dengan penilaian kinerja pada perusahaan. Untuk Menganalisis tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di lihat dari sisi pengeluaran maka formula perhitungannya adalah ratio antara penerimaan

daerah dengan belanja rutin, dimana semakin kecil rasionya maka semakin efisien pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses yang sistematis untuk menilai apakah program atau kegiatan yang telah direncanakan sudah sesuai dan yang terpenting adalah apakah sudah sesuai dengan target yang direncanakan. Pengukuran kinerja dimulai dengan proses penetapan indikator kinerja yang memberikan informasi sehingga memungkinkan unit kerja sektor publik untuk mengontrol kinerjanya dalam menghasilkan output dan outcome terhadap masyarakat. Pengukuran kinerja bermanfaat untuk membantu dalam mengambil keputusan dan memperbaiki kinerja serta berfokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik.

Bappeda Provinsi Sumatera Barat merupakan lembaga teknis yang berperan dalam proses perencanaan pembangunan. Ini sangatlah penting bagi Bappeda untuk menentukan berbagai penetapan analisis dalam penggunaan anggaran dan juga belanja. Dalam penilaian kinerja anggaran dapat dilihat seberapa jauh anggaran yang ada dan berapa realisasi yang akan disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan belanja pada instansi selama masa anggaran satu tahun tersebut. Anggaran digunakan untuk merancang program kerja atau langkah – langkah yang akan dilakukan setiap aktivitas agar dapat terarah dan terkontrol dengan baik.

Hubungan antara anggaran dan realisasi yaitu memberikan gambaran bagaimana sebuah instansi dapat dikatakan efisien ataupun tidak, dalam pengambilan keputusan penganggaran dan biaya – biaya selama satu tahun anggaran tersebut. Dengan menggunakan analisis yang didasarkan pada penggambaran yang mendukung analisa kinerja anggaran belanja. Untuk mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nominal maupun

persentasenya berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) belanja yang ditampilkan, sehingga terlihat sejauh mana tingkat keefektifan dan penyerapan anggaran untuk aktivitas instansi selama satu tahun anggaran tersebut. Pengukuran kinerja anggaran ini dapat menggunakan Analisis Varians Belanja.

Untuk mengetahui seberapa besar anggaran dan realisasi terwujud dalam suatu instansi dapat dilihat melalui pemenuhan pada kegiatan belanja yang digunakan oleh instansi. Seperti dengan melihat pertumbuhan masing – masing belanja, apakah pertumbuhan tersebut logis dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Pengukuran kinerjanya dapat dengan menggunakan Analisis Pertumbuhan Belanja. Serta pengukuran kinerja lainnya dapat dengan menggunakan Analisis Keceragaman Belanja yang mana bermanfaat untuk menentukan keseimbangan antar belanja. Dengan salah satunya seperti menilai rasio belanja operasi dengan total belanja secara keseluruhan. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui keseimbangan antar belanja yang menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan dananya pada belanja secara optimal. Pengukuran kinerja anggaran lainnya dapat menggunakan rasio efisiensi belanja. Pengukuran kinerja anggaran yang difungsikan untuk menunjukkan produktivitas dan efektivitas belanja yang digunakan oleh suatu instansi.

Alasan penulis mengangkat judul ini adalah dikarenakan salah satu tugas Bappeda yaitu tentang pengurusan anggaran belanja. Ini disebabkan karena terdapat beberapa hambatan yang menjadikan sistem dari penganggaran belanja sendiri menjadi kurang efektif karena terkadang yang menjadi acuan penganggaran ada yang belum bisa dikelola pada proses perencanaan anggaran itu sendiri. Berdasarkan sebagian besar uraian, penulis tertarik mengambil judul mengenai “Analisis Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana informasi mengenai realisasi atas anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)?
2. Seberapa besar pertumbuhan realisasi anggaran belanja dari periode 2017 – 2019?
3. Apakah selisih realisasi dari yang dianggarkan sudah efisien?
4. Apakah penggunaan anggaran belanja selama tahun 2017 – 2019 telah efisien?
5. Apakah pemerintah daerah sudah menggunakan anggaran belanja secara optimal?

1.3 Tujuan Magang

Adapun tujuan dari kegiatan magang ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan realisasi anggaran belanja selama periode anggaran.
2. Untuk mengetahui efisiensi dari penggunaan anggaran belanja.
3. Melengkapi SKS sesuai dengan yang telah ditetapkan sebagai syarat kelulusan diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
4. Sebagai sarana untuk mengembangkan kompetensi diri.
5. Menambah pengalaman untuk menghadapi dunia kerja nantinya.
6. Memperluas wawasan mahasiswa mengenai dunia kerja yang sesungguhnya.
7. Mempersiapkan mahasiswa memasuki dunia kerja lebih cepat.
8. Menjadikan perusahaan tempat magang sebagai objek peneitian untuk tugas akhir mahasiswa, sehingga dibuat dengan benar – benar mencerminkan masalah riil yang terjadi di perusahaan.

1.4 Manfaat Magang

Adapun manfaat dilaksanakannya magang yaitu :

A. Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sebagai sarana untuk menjembatani antara perusahaan dengan lembaga pendidikan untuk bekerja sama lebih lanjut, baik bersifat akademis maupun non akademis.

B. Bagi Perguruan Tinggi

1. Menciptakan sumber daya manusia dengan keahlian profesional yang dapat bersaing dalam dunia kerja.

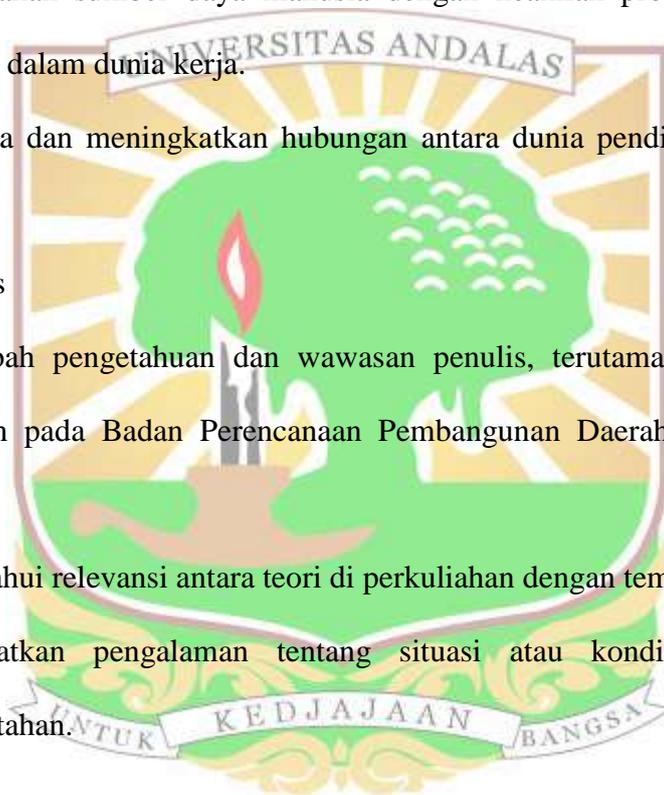
2. Membina dan meningkatkan hubungan antara dunia pendidikan dengan dunia kerja.

C. Bagi Penulis

1. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis, terutama dalam penyusunan anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2. Mengetahui relevansi antara teori di perkuliahan dengan tempat di perusahaan.

3. Mendapatkan pengalaman tentang situasi atau kondisi dunia kerja di pemerintahan.



1.5 Tempat dan Waktu Magang

Penulis memilih Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Barat sebagai tempat magang dengan waktu magang selama 40 (empat puluh) hari kerja yang dimulai dari tanggal 06 Januari sampai dengan 28 Februari 2020.

1.6 Rencana Kegiatan Magang

Sebelum melaksanakan kegiatan magang, terlebih dahulu membuat rencana kegiatan magang yaitu sebagai berikut :

1. Pengajuan proposal magang kepada program studi
2. Mengantarkan surat izin magang ke instansi
3. Mengambil surat balasan dari instansi
4. Mengikuti kegiatan magang
5. Mengenali lingkungan kerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Mengetahui gambaran umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Penulisan laporan magang

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Laporan Magang terdiri dari 5 bab yang akan membahas hal-hal sebagai berikut :

Bab I Berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang mengungkapkan ulasan pemilihan topik, rumusan masalah yang merupakan dasar isi dan pembahasan, Tujuan penulisan yang menjawab rumusan masalah, tujuan dan manfaat yang diterima dari kegiatan magang, tempat dan waktu magang, serta sistematika penulisan.

Bab II Berisi tentang landasan teori yang menjelaskan tentang pengertian anggaran, fungsi anggaran, jenis-jenis anggaran, tujuan anggaran, karakteristik anggaran, pengertian anggaran kas, fungsi anggaran kas, ruang lingkup anggaran kas, serta elemen anggaran kas.

- Bab III Berisi tentang gambaran umum instansi yang meliputi sejarah singkat instansi, visi dan misi, tujuan dan sasaran, tugas dan fungsi instansi, serta struktur organisasi instansi tersebut.
- Bab IV Berisi tentang pembahasan mengenai analisis laporan realisasi anggaran serta rasio – rasio yang digunakan untuk menganalisis realisasi anggaran.
- Bab V Berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dan saran yang dianggap perlu untuk bahan pertimbangan guna perbaikan dan perubahan dimasa yang akan datang.

